

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PERSEDIAAN OBAT FARMASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) (STUDI KASUS PUSKESMAS SELONG)

Rofiq Notonegoro¹

Notonegororofiq@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Bambang²

bambang@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengendalian internal persediaan obat di Puskesmas Selong dengan menggunakan kerangka COSO. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui kuesioner, dengan wawancara dan observasi sebagai data pelengkap. Analisis dilakukan menggunakan rumus persentase untuk melihat efektivitas tiap komponen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berada pada kategori sangat baik. Sedangkan, penilaian risiko berada pada kategori baik karena pemanfaatan teknologi belum optimal. Komunikasi internal berjalan lancar, akan tetapi pencatatan digital masih terbatas pada kombinasi manual dan elektronik. Secara keseluruhan, pengendalian internal di Puskesmas Selong berjalan efektif, walaupun peningkatan teknologi informasi dan pengawasan fisik masih diperlukan.

Kata Kunci: COSO, Pengendalian Internal, Persediaan Obat, Puskesmas

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of internal control of drug supply at the Selong Community Health Center using the COSO framework. The method used is descriptive quantitative through questionnaires, with interviews and observations as supplementary data. Analysis was conducted using a percentage formula to determine the effectiveness of each component. The results show that the control environment, control activities, information and communication, and monitoring are in the very good category. Meanwhile, risk assessment is in the good category because the use of technology is not optimal. Internal communication runs smoothly, but digital recording is still limited to a combination of manual and electronic. Overall, internal control at the Selong Community Health Center is running effectively, although improvements in information technology and physical supervision are still needed.

Keywords: COSO, Internal Control, Drug Supply, Community Health Center

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam operasional lembaga, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Puskesmas ialah suatu lembaga pelayanan kesehatan dasar utama di Indonesia. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 6 Tahun (2024), Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif.

Seiring meningkatnya jumlah dan kompleksitas layanan yang diberikan Puskesmas, pengelolaan sumber daya, khususnya persediaan obat-obatan, menjadi aspek yang sangat krusial. Sedangkan berbagai laporan dan penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan obat di fasilitas kesehatan, termasuk indikasi kecurangan dalam perencanaan dan pengadaan obat (Taher, 2019). Ketidakefisienan dalam pengelolaan ini disinyalir terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, yang mengakibatkan kelangkaan obat dan terganggunya pelayanan kepada pasien.

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Lima komponen utama dalam kerangka COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan merupakan dasar dalam memastikan efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk dalam aspek pengelolaan persediaan.

Persediaan obat merupakan aset penting dalam pelayanan kesehatan. Menurut PSAK 202 Persediaan adalah aset yang disimpan untuk dijual, dalam proses produksi, atau untuk digunakan dalam penyediaan jasa. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mengalami kehilangan, kerusakan, atau kadaluwarsa, yang berdampak pada kualitas layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi dan pengendalian internal yang memadai untuk mendukung proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat.

Selain itu juga penerapan sistem informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan obat-obatan. Dalam sistem informasi, proses pengadaan, penerimaan dan pengeluaran obat-obatan dapat terintegrasi dengan baik, sehingga meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengelolaan persediaan. Selain itu, penggunaan sistem informasi juga dapat memudahkan dalam pemantauan terhadap pengeluaran obat-obatan, sehingga memungkinkan pengelola persediaan untuk mengontrol pengeluaran obat-obatan dengan lebih baik.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pengendalian internal berkontribusi signifikan terhadap efektivitas sistem manajemen persediaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fathah (2019) pada RS PKU Muhammadiyah Nanggulan menyatakan bahwa pengendalian internal dapat menjadi faktor yang penting agar suatu sistem mampu berjalan secara efektif. Fathah juga menambahkan pengendalian internal memberikan dampak positif terhadap suatu organisasi, sebaliknya organisasi tanpa pengendalian internal tujuan organisasinya tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien (Islami, 2025). Semakin besar suatu organisasi semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam organisasi tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hakim & Rosmida (2022) juga menyatakan pentingnya pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya kerusakan, kelalaian pencatatan, atau ketidaksesuaian antara data dan persediaan yang ada. Hakim & Rosmida juga menekankan pengendalian yang baik harus mencakup pemeriksaan persediaan secara periodik untuk memastikan bahwa catatan persediaan yang ada sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran operasional rumah sakit dan memastikan bahwa obat yang dibutuhkan selalu tersedia tanpa penundaan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra & Abrar (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya terkait pengendalian internal persediaan obat di beberapa apotek di Pekanbaru belum terlaksana secara memadai,

baik dari segi struktur organisasi, aktivitas pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, maupun sistem informasi dan komunikasi internal. Hal ini meningkatkan risiko operasional, kerugian finansial, serta membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Makbul et al. (2023) mendeskripsikan bahwasannya pengelolaan persediaan obat di RSPT Universitas Hasanuddin telah menerapkan pengendalian internal yang memadai. Akan tetapi, penguatan masih diperlukan pada aspek SDM dan evaluasi operasional secara menyeluruh guna meminimalisasi risiko dan meningkatkan efektivitas pengendalian obat.

Puskesmas Selong ialah suatu pelayanan kesehatan tingkat pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dari 149 fasilitas kesehatan yang ada (Dyatmika et al., 2024). Puskesmas Selong yang berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1968 adalah suatu pelayanan kesehatan yang lokasinya berada di kabupaten Lombok Timur dari 35 fasilitas kesehatan serupa yang memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan untuk pasien umum, pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pasien BPJS. Karena sifat layanan kesehatan yang personal, penting bagi layanan tersebut disediakan dengan cepat. Seorang apoteker bertindak sebagai kepala kepala unit layanan di pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan farmasi sesuai dengan Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020. Teknisi kesehatan yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan dan diawasi oleh apoteker akan memberikan layanan farmasi terbatas di pusat kesehatan jika tidak ada apoteker. Manajemen persiapan obat, pembuangan persediaan medis, evaluasi resep dan layanan, layanan informasi obat, serta pemantauan efek samping termasuk dalam layanan farmasi terbatas. Maka karenanya, pengendalian internal atas obat-obatan sangat penting untuk mencegah berbagai risiko.

Penelitian terkait pengendalian internal terhadap persediaan obat farmasi pada Puskesmas Selong tujuannya ialah guna mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal atas persediaan obat di Puskesmas Selong. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO. Selain itu penelitian ini juga mengukur tingkat kepatuhan Puskesmas Selong terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan persediaan obat, serta menganalisis peran dan efektivitas penggunaan sistem informasi dalam mendukung pengendalian internal atas persediaan obat.

TINJAUAN LITERATUR

Pengendalian Internal

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* Pengendalian internal adalah proses yang diberlakukan oleh suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan akan tercapai. Pengendalian internal membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana mengelola risiko. Hal ini memungkinkan manajemen untuk tetap fokus pada operasi entitas dan mengejar target kinerjanya sembari mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan.

Teori Pengendalian internal merujuk pada seperangkat prinsip dan sistem yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan kegiatan operasional berlangsung secara efisien, aset-aset penting terlindungi dengan baik, serta proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara tepat dan akurat (Hasra, Afiah, & Nuraisyiah, 2025). Pengendalian internal bertujuan untuk membantu organisasi mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan maupun kecurangan, memastikan setiap aktivitas mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta mendorong terciptanya efisiensi dalam operasional perusahaan (Ngurawan, Morasa, & Kapojos, 2021). Manajemen persediaan merupakan pendekatan yang dimanfaatkan guna mengatur dan mengelola persediaan barang dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan selalu tersedia tepat waktu, tanpa menimbulkan pemborosan dan kerugian.

Berdasarkan kerangka COSO pengendalian internal dibedakan menjadi 5 komponen yang saling berkaitan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, diantaranya:

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Setiap perusahaan yang ingin menerapkan sistem pengendalian internal harus terlebih dahulu menetapkan lingkungan pengendalian. Lingkungan ini terdiri dari konvensi, protokol, dan kerangka kerja. Lingkungan pengendalian mencakup berbagai hal misalnya integritas dan prinsip etika organisasi, parameter yang memungkinkan dewan direksi melaksanakan tugas pengawasan tata kelola, pengklasifikasian tugas di dalam organisasi, perekrutan, pelatihan, serta retensi karyawan yang kompeten, juga penggunaan evaluasi kinerja yang ketat, insentif, dan penghargaan untuk mendorong tanggung jawab atas hasil. Hasil akhir, yaitu lingkungan pengendalian, memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risiko dapat didefinisikan sebagai probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang mampu memberi dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman terhadap pencapaian tujuan merupakan bagian penting dari penilaian risiko, yang merupakan proses berkelanjutan dan terus berubah. Proses penilaian risiko memerlukan penetapan tujuan di setiap tingkat institusi. Untuk secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko terkait tujuan ini, manajemen harus secara eksplisit menetapkan tujuan dalam tiga kategori utama: operasional, pelaporan dan kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk memastikan bahwa perintah manajemen untuk mengelola dan meminimalkan risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi dilaksanakan secara efisien, aktivitas pengendalian diterapkan melalui kebijakan dan prosedur. Tugas-tugas ini digunakan dalam lingkungan berbasis teknologi dan pada berbagai tahap proses operasional di seluruh perusahaan.

Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Dalam memenuhi kewajiban pengendalian internal serta mencapai tujuan organisasi, entitas sangat bergantung pada informasi. Untuk memastikan bahwa semua komponen pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya, manajemen harus mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi berkualitas tinggi dari dalam dan luar perusahaan. Proses komunikasi, yang bersifat berkelanjutan dan berulang, menjadi sarana utama dalam menyampaikan, membagikan, dan menerima informasi yang dibutuhkan. Komunikasi internal memfasilitasi penyebaran informasi ke seluruh tingkatan organisasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun antar unit sehingga memastikan bahwa seluruh personel memahami dengan jelas peran dari manajemen puncak mengenai pentingnya menjalankan tanggung jawab pengendalian secara serius.

Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Entitas dapat memanfaatkan evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta kombinasi keduanya, dan sarana utama yang bertujuan menyampaikan, berbagi, dan menerima informasi yang diperlukan untuk mengendalikan prinsip-prinsip di setiap komponen adalah proses komunikasi yang berkelanjutan dan berulang. Biasanya, proses bisnis di berbagai tingkatan perusahaan mencakup evaluasi berkelanjutan, yang menyediakan informasi secara real-time. Hasil penilaian risiko, efektivitas penilaian berkelanjutan, serta faktor manajemen yang lain menentukan frekuensi dan cakupan penilaian terpisah yang dilakukan secara berkala. Kebijakan manajemen internal dan dewan direksi, serta kebijakan badan regulasi dan organisasi yang menetapkan standar, akan dipertimbangkan saat menganalisis hasil penilaian. Manajemen dan

dewan direksi perlu diberitahu tentang kekurangan yang terdeteksi secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal yang mengacu pada *COSO Internal Control Integrated Framework* (2013), diklasifikasikan ke dalam tiga elemen utama, diantaranya ialah:

1. Tujuan Operasional

Tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional entitas. Pengendalian internal dalam konteks ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan melalui pemisahan fungsi-fungsi utama seperti operasional, penyimpanan, dan pencatatan. Meskipun terdapat pemisahan fungsi, komunikasi antar bagiannya tetap diperlukan guna menjaga sinergi dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya pengendalian internal, perusahaan dapat menghindari aktivitas yang tidak produktif dan pemborosan sumber daya, sekaligus memastikan perlindungan atas aset dan keandalan pencatatan.

2. Tujuan Pelaporan

Tujuan ini berfokus pada penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen untuk kepentingan para pemangku kepentingan bergantung pada sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam situasi seperti ini, manajemen harus menyajikan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan dapat dipercaya.

3. Tujuan Kepatuhan

Tujuan ini berkaitan dengan pematuhan bagi seluruh peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Guna memastikan bisnis mematuhi semua peraturan dan ketentuan, perusahaan memiliki sistem pengendalian. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas operasional serta menghindari potensi pelanggaran hukum oleh pihak internal perusahaan.

Persediaan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 202 tentang Persediaan, persediaan didefinisikan sebagai aset yang:

1. Dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
2. Sedang dalam proses produksi untuk tujuan penjualan; atau
3. Berupa bahan baku atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa.

Persediaan merupakan salah satu komponen penting dari aset perusahaan yang secara langsung mempengaruhi perhitungan laba pada laporan laba rugi serta nilai total aset dalam neraca. Mengingat peran strategisnya, pengelolaan persediaan menjadi perhatian utama dalam aktivitas manajerial maupun pelaporan keuangan (Alfarizin & Nurabiah, 2025).

Menurut Arens, dkk (2016) persediaan ialah aset kepunyaan perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, digunakan dalam proses produksi, atau akan digunakan dalam produksi barang dan jasa. Arens juga mengelompokkan persediaan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu: barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku.

Secara umum, persediaan dapat diartikan sebagai aset lancar milik perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam siklus usaha tertentu, digunakan dalam proses produksi, atau berupa barang yang masih dalam pengolahan.

Menurut Rasdiyatno et al. (2024), manajemen persediaan merupakan pendekatan untuk mengatur dan mengelola stok barang secara efisien dan efektif, dengan tujuan memastikan ketersediaan barang tanpa pemborosan atau kekurangan yang dapat mengganggu operasional.

Metode Pencatatan Persediaan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 202 tentang Persediaan, persediaan harus diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha normal, yang dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian serta biaya yang diperlukan untuk menjualnya.

Dalam akuntansi, terdapat dua metode utama dalam pencatatan persediaan, yaitu:

1. Metode Perpetual (Buku)

Metode pencatatan atau perpetual secara terus-menerus merupakan sistem di mana setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan dicatat secara langsung dan rinci pada saat terjadinya. Dengan pendekatan ini, informasi mengenai jumlah dan nilai persediaan selalu mutakhir dan dapat diketahui kapan saja. Setiap pembelian dan penjualan akan langsung mempengaruhi saldo akun persediaan.

2. Metode Periodik (Fisik)

Metode periodik atau metode fisik merupakan sistem pencatatan persediaan yang tidak mencatat pergerakan barang secara langsung pada saat terjadi transaksi. Perusahaan mencatat transaksi pembelian melalui akun pembelian dan penjualan melalui akun penjualan, tanpa mencatat mutasi persediaan secara langsung. Oleh karena itu, nilai dan jumlah persediaan hanya dapat diketahui pada akhir periode akuntansi melalui proses perhitungan fisik (stok opname). Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang tidak memerlukan data persediaan secara real time.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah deskriptif dengan memanfaatkan model kuantitatif yang menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengukuran numerik menggunakan instrumen yang berupa kuesioner. Selain itu dalam proses penelitian terdapat data yang bersifat non numerik yang didapatkan lewat observasi serta wawancara yang hanya dipakai sebagai pendukung tambahan melengkapi interpretasi hasil kuantitatif. Urgensi dari penelitian ini ialah guna mencari tahu serta memahami fenomena pengendalian internal terhadap persediaan obat di Puskesmas Selong. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui kuesioner kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab atas pengendalian internal pada Puskesmas dan instalasi farmasi. Selain melalui kuesioner pengumpulan data dilakukan juga melalui wawancara dan observasi, akan tetapi hanya sebagai pelengkap data. Adapun tempat penelitian dilakukan di Puskesmas Selong yang berlokasi di Jalan. L. Muhdar No. 8, Sandubaya, Selong, Lombok Timur.

Teknik yang dimanfaatkan guna menganalisa data pada penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan rumus persentase. Hasil analisa kemudian dikelompokkan berdasarkan komponen COSO untuk menunjukkan tingkat efektivitas masing-masing aspek pengendalian internal:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \right) \times 100\%$$

Dengan interpretasi hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Hasil

Rentang Persentase	Interpretasi
81%-100%	Sangat Baik
61%-80%	Baik
41%-60%	Cukup
21%-40%	Kurang
0%-20%	Sangat Kurang

Sumber: Diadaptasi dari Dewi & Sepriadi, (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Puskesmas

UPT Puskesmas Selong merupakan salah satu puskesmas induk yang berlokasi di Desa Selong, Kecamatan Selong. Secara administrative, puskesmas ini termasuk dalam wilayah perkotaan di bagian timur Pulau Lombok. Luas wilayah kerjanya mencapai 14,81 km² dengan cakupan pelayanan kepada penduduk sebanyak 46.793 jiwa.

Puskesmas Selong memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan perorangan maupun pelayanan masyarakat. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, Puskesmas berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan yang diberikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.

Gambaran dan Penjelasan Mengenai Pengelolaan Persediaan Obat

Pengelolaan obat di Puskesmas merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan penting dan saling berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga penanganan obat kadaluwarsa. Setiap tahapan dijalankan berdasarkan ketentuan dari Dinas Kesehatan serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Perencanaan Kebutuhan Obat

Tahapan awal dalam pengelolaan obat dimulai dari proses perencanaan. Di puskesmas, perencanaan kebutuhan obat dibedakan berdasarkan dua sumber pendanaan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh puskesmas secara langsung. Untuk kebutuhan yang berasal dari DAK, perencanaan dilakukan setiap bulan menggunakan formulir LP-LPO (Laporan Pemakaian dan Permintaan Obat). Sedangkan untuk kebutuhan obat dari JKN, puskesmas menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) setiap tahun dan diajukan ke Dinas Kesehatan.

Dalam perencanaan, dilakukan perhitungan sisa stok dari bulan sebelumnya, jumlah pemakaian, dan buffer stock sekitar 10% untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan informan yang menyatakan “misalkan kita itu pemakaiannya atau stoknya 10 itu ada perhitungannya, kalau misalnya perbulan itu kita pemakaiannya 100 berarti kalau stok optimumnya itu selama 2 bulan berarti kan 200 tapi kan kita ada sisa stoknya 10 berarti sisa 90 seperti itu dah otomatisnya” (kepala bidang farmasi). Meskipun telah dilakukan perhitungan yang matang, jumlah obat yang diterima dari dinas tidak selalu sesuai dengan permintaan, karena disesuaikan dengan ketersediaan yang ada.

Pengadaan Obat

Pengadaan obat dari dua sumber pendanaan tersebut memiliki mekanisme yang berbeda. Pengadaan melalui DAK didasarkan pada pengajuan LP-LPO setiap bulan, sedangkan pengadaan melalui JKN dilakukan setelah pengajuan RKO tahunan yang disusun Puskesmas. Dinas kesehatan berperan dalam menyiapkan penyedia atau vendor melalui sistem e-katalog

nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh informan menyatakan “kita ini kan tidak boleh belanja sembarangan, kalau kita misalkan belanja ke apotek berarti harus menggunakan resep, tapi kan biasanya konsepnya itu kan apotek kan harus order ke pedagang besar farmasi, kemudian pedagang besarnya itu kan ke industri. Jadinya dari dinas kesehatan ini yang mencarikan penyediannya sebagai perantara untuk menyiapkan vendornya, yang nantinya kami yang menyiapkan RKO selama satu tahun berjalan, yang nantinya dari dinas kesehatan yang mengkonfirmasi ke penyediannya lewat pembagian e-katalog” (kepala bidang farmasi). Mekanisme pengadaan ini tidak memungkinkan puskesmas untuk membeli obat secara langsung ke apotek atau distributor tanpa melalui jalur resmi. Obat yang disuplai umumnya memiliki masa kadaluwarsa yang cukup panjang (di atas dua tahun), sehingga risiko penumpukan obat kadaluwarsa dapat ditekan.

Penerimaan dan Pencatatan

Setelah obat dikirimkan oleh penyedia, puskesmas melakukan proses penerimaan yang disertai pencatatan. Obat yang diterima dicatat terlebih dahulu dalam buku penerimaan, kemudian dipindahkan ke kartu stok berdasarkan item. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan “kita ada pencatatan buku penerimaan khusus yang nantinya dipindah ke kartu stok, yang mana kartu stok itu berdasarkan per item” (kepala bidang farmasi). Buku penerimaan mencatat seluruh obat yang masuk secara umum, sedangkan kartu stok digunakan untuk mencatat kuantitas dan penggunaan setiap item obat secara rinci.

Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat di puskesmas dilakukan dengan sistematis agar memudahkan pencarian dan pengendalian stok. Sistem penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan urutan alfabetis, jenis penyakit (seperti antibiotik, antihipertensi, obat pencernaan), maupun berdasarkan golongan obat. Ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan “penyimpanan obatnya disini kan bermacam-macam berdasarkan jenis penyakitnya bisa, berdasarkan alfabetis juga bisa ataupun berdasarkan golongan” (kepala bidang farmasi). Akan tetapi, untuk kemudahan akses dan pencarian oleh petugas, sistem alfabetis lebih banyak digunakan. Dengan sistem ini, obat disimpan sesuai abjad nama generiknya, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mendukung pelaksanaan prinsip FIFO (First In, First Out).

Distribusi Obat

Distribusi obat dilakukan dari gudang utama ke ruangan pelayanan klinis serta ke berbagai unit pelayanan lain seperti UGD, ruang bersalin/KIA, dan unit gizi. Selain itu, distribusi yang menjangkau fasilitas pelayanan eksternal seperti Polindes dan Pustu. Setiap unit pelayanan memiliki sistem pencatatan tersendiri, yang meliputi buku penerimaan dan kartu stok. Pada akhir bulan, seluruh unit melaporkan data LP-LPO kepada Dinas Kesehatan sebagai dasar perencanaan kebutuhan bulan berikutnya. Ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan “pada akhir bulan biasanya dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bulan yang berjalan, itu biasanya diatas 25 para staf sudah mengumpulkan laporan untuk persiapan obatnya bulan depan penerimaan selanjutnya” (kepala bidang farmasi).

Penanganan Obat Kadaluwarsa

Penanganan obat Kadaluwarsa di puskesmas dilakukan dengan prinsip FIFO atau FEFO guna mencegah penumpukan obat yang mendekati masa kadaluwarsa. Jika terdapat obat yang sudah Kadaluwarsa, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mendistribusikan kembali obat tersebut ke unit-unit yang masih membutuhkan. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemusnahan.

Akan tetapi, apabila obat Kadaluwarsa tidak dapat dimanfaatkan, maka dilakukan pemusnahan secara kolektif. Pemusnahan ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi untuk menangani limbah farmasi.

Proses pemusnahan melibatkan pengemasan khusus, daftar item berdasarkan berat, dan perhitungan biaya berdasarkan tarif per kilogram (misalnya Rp.27.500/kg). Hal sesuai pernyataan dari informan yang menyatakan “terdapat pihak khusus yang memang menangani pemusnahan, yang mana dari puskesmas selong itu yang mengirimkan item barangnya, kan kita nanti ada itemnya, terus berdasarkan harga persatuannya kemudian nanti jumlahnya berarti dikalkulasikan berapa beratnya. Selanjutnya tinggal dikalikan beratnya berapa kilo terus dikalikan perkilo harga dari pemusnahan, yang mana tahun lalu harganya 27.500/kg” (kepala bidang farmasi). Setelah proses pemusnahan dilakukan, puskesmas menerima berita acara sebagai dokumen pertanggungjawaban. Pemusnahan ini biasanya dilakukan satu atau dua tahun sekali karena minimnya jumlah obat Kadaluwarsa yang tidak terpakai.

Uraian Penerapan Kerangka Pengendalian Internal COSO di Puskesmas Selong

Dalam penelitian yang dilakukan di Puskesmas Selong untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan persediaan obat disana, peneliti melakukan penyebaran kuesioner langsung kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses tersebut. Adapun penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui dan menilai bagaimana sistem pengendalian internal diaplikasikan secara efektif juga efisien dengan berlandaskan lima kategori utama dari kerangka COSO, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Tabel 2. Instrumen Kuesioner Penelitian

Komponen COSO		Ya	Tidak
Lingkungan Pengendalian	1. Apakah Puskesmas sudah menerapkan standar perilaku dan etika dengan baik.	√	
	2. Apakah terdapat dewan pengawas yang independen melakukan pengawasan pada pengembangan dan kinerja pengendalian internal.	√	
	3. Apakah Puskesmas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari Puskesmas tersebut.	√	
	4. Apakah manajemen Puskesmas telah menetapkan jalur pelaporan, wewenang, beserta tanggung jawab yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan Puskesmas tersebut.	√	
	5. Apakah Puskesmas mempunyai kebijakan (prosedur) dalam proses rekrutmen, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan mampu sejalan dengan tujuan Puskesmas tersebut.	√	
	6. Apakah Puskesmas memiliki standar bagi setiap karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal atas tanggung jawabnya masing-masing.		
Penilaian Risiko	1. Apakah Puskesmas memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga mampu menghindari atau mengurangi terjadinya risiko kecurangan dan kesalahan.	√	
	2. Apakah Puskesmas telah memiliki sistem pencatatan terhadap keluar masuknya obat yang baik sehingga mampu menghindari terjadinya risiko kecurangan dan kesalahan.	√	
	3. Apakah Puskesmas mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam penilaian risiko.	√	
	4. Apakah Puskesmas ada melakukan pertimbangan terhadap teknologi baru untuk mendukung sistem pengendalian internal khususnya pada bagian persediaan.		√
Aktivitas Pengendalian	1. Apakah terdapat kebijakan yang diperuntukan pada bagian persediaan terkait keluar masuknya obat-obatan.	√	
	2. Apakah terdapat pembagian tugas serta wewenang pada bagian yang terlibat dengan persediaan.	√	
	3. Apakah pegawai gudang dibebani tanggung jawab	√	

	terhadap persediaan obat-obatan yang hilang dan rusak.		
	4. Apakah Puskesmas menggunakan perangkat lunak (software) dalam melakukan pencatatan dan transaksi.	√	
	5. Apakah di gudang penyimpanan Puskesmas sudah dipasangkan CCTV agar dapat mencegah terjadinya kecurangan.		√
	6. Apakah dokumen-dokumen yang ada dirancang untuk memudahkan dalam pencantuman semua informasi yang diperlukan.	√	
	7. Apakah ada koordinasi terkait dokumen-dokumen dan pencatatan terhadap keluar masuknya obat.	√	
	8. Apakah pada bagian persediaan terdapat tempat khusus yang diperuntukan menyimpan obat.	√	
	9. Apakah terdapat tindakan pengecekan secara rutin yang dilakukan terhadap persediaan yang ada di gudang.	√	
Informasi dan Komunikasi	1. Apakah terdapat sistem informasi yang digunakan oleh Puskesmas terhadap semua pencatatan transaksi mengenai obat-obatan.	√	
	2. Apakah terdapat komunikasi antara satu departemen dengan departemen yang lainnya maupun antara karyawan dengan atasan maupun pimpinan berjalan dengan baik.	√	
	3. Apakah terdapat persediaan otorisasi transaksi pada bagian persediaan.	√	
Pemantauan	1. Apakah telah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan aktivitas pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh kepala gudang agar mampu menjamin pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.	√	
	2. Apakah Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal persediaan.	√	

Sumber: Turunan dari setiap komponen COSO

Table 3. Hasil Perhitungan dan Analisis per Komponen COSO

Komponen COSO	Jumlah Pertanyaan	Jawaban "Ya"	Persentase	Interpretasi
Lingkungan Pengendalian	6	6	100%	Sangat Baik
Penilaian Risiko	4	3	75%	Baik
Aktivitas Pengendalian	9	8	88.89%	Sangat Baik
Informasi dan Komunikasi	3	3	100%	Sangat Baik
Pemantauan	2	2	100%	Sangat Baik

Sumber: Hasil analisis perhitungan kuesioner

Analisis dan Interpretasi

Lingkungan Pengendalian (100%)

Seluruh indikator telah dipenuhi oleh responden. Hal ini mencerminkan bahwa struktur organisasi, etika kerja, dan jalur pelaporan di Puskesmas telah berjalan optimal.

Penilaian Resiko (75%)

Hanya 3 dari 4 indikator yang dipenuhi. Kekurangan terletak pada aspek pertimbangan teknologi baru untuk mendukung sistem pengendalian.

Aktivitas Pengendalian (88.89%)

Terdapat 1 kelemahan dari 9 item, yaitu belum adanya pengawasan CCTV dalam gudang obat. Meskipun demikian, SOP, pembagian tugas, dan pengecekan sudah dilakukan dengan baik.

Informasi dan Komunikasi (100%)

Seluruh item menunjukkan bahwa komunikasi antar departemen dan sistem informasi telah terbangun dengan baik. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi digital masih terbatas pada kombinasi pencatatan manual dan elektronik, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar digitalisasi penuh dapat tercapai.

Pemantauan (100%)

Evaluasi dan monitoring oleh kepala gudang telah dilaksanakan selaras bersama prosedur yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Selong telah berupaya menerapkan pengendalian internal atas persediaan obat dengan cukup baik, berdasarkan lima komponen kerangka COSO. Dimulai dari lingkungan kerja yang tertata dengan struktur organisasi yang jelas, hingga adanya standar kinerja yang mendukung terciptanya tanggung jawab dalam pengelolaan obat. Di sisi lain, kesadaran terhadap risiko juga sudah diperhatikan dengan kategori baik, walaupun masih perlu peningkatan pada aspek teknologi pendukung. Hal ini terbukti dengan adanya sistem pencatatan yang menggabungkan cara manual dan elektronik. Akan tetapi, penggunaan teknologi belum sepenuhnya optimal dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Aktivitas pengendalian di lapangan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk pembagian tugas antar unit, pelaporan kehilangan atau kerusakan, dan penyimpanan obat sesuai standar. Sayangnya pengawasan fisik seperti CCTV belum tersedia, padahal hal ini bisa menjadi pelengkap dalam menjaga keamanan stok. Untuk urusan informasi dan komunikasi, Puskesmas Selong memperlihatkan koordinasi yang baik antar bagian. Ketika stok obat kosong, mereka dapat bergerak cepat dan bekerja sama dengan fasilitas lain sebagai solusi. Kemudian kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin, baik melalui stok opname maupun evaluasi tahunan, yang membantu memastikan catatan selalu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, pengendalian internal di Puskesmas Selong sudah berjalan secara efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan, terutama di bidang digitalisasi dan pengawasan stok. Untuk kedepannya akan sangat bermanfaat jika dilakukan penelitian lanjutan untuk menilai bagaimana teknologi dapat membantu memperkuat pengelolaan persediaan farmasi, dan sejauh mana nantinya hal tersebut mampu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan aman.

REFERENSI

- Alfarizin, M. R., & Nurabiah. (2025). Kendala dan solusi pencatatan barang di pt. gerbang ntb emas mataram. *Prakbis: Jurnal praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 113–120.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2016). *Auditing And Assurance services. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 16th ed.* Pearson.
- Dewi, R. P., & Sepriadi, S. (2021). Minat Siswa SMP Terhadap Pembelajaran PJOK Secara Daring Pada Masa New Normal. *Physical Activity Journal*, 2(2), 205.
- Dyatmika, I. P., Surbakti, S. R., Mulana, L. Y., Fitriana, I., Zuriatina, I., Taupikurrahman, Hapsari, M. R. P., et al. (2024). Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 44, 514.
- Fathah, R. N. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Latar belakang 2 . Bagaimana sistem

- pengendalian internal yang tepat untuk mengembangkan tata kelola, 3(1), 198–208.
- Hakim, M. A., & Rosmida, R. (2022). Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1).
- Hasra, N. F., Afiah, N., & Nuraisyiah. (2025). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Puskesmas Batua Raya Makassar. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 242–251.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.202 (Psak 202).
- Indonesia, menteri K. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2024. *Kementrian Kesehatan*, 31–34.
- Indonesia, M. K. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang. *Kaos GL Dergisi*.
- Islami, F. P. (2025). Analysis of the Implementation of the Development Information System (SIPBANG2) at the NTB Provincial Library and Archives. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 4(1), 51–70.
- Makbul, K., Syamsuddin, S., & Said, D. (2023). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal pada Pengelolaan Persediaan Obat-Obatan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 93–102.
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- PWC. (2013). Internal Control - Integratd Framework. *Coso*, (May), 1–20.
- Rasdiyatno, R. D., Iqbal, M., & Hasibuan, A. (2024). Manajemen Persediaan Yang Efektif Untuk Mengoptimalkan Operasi Perusahaan Industri. *Musyteri : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 6(1), 71–80.
- Saputra, D., & Abrar. (2022). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Persediaan Obat Pada Apotek Di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 23–33.
- Taher, A. P. (2019). ICW Temukan Kekosongan Obat Pasien BPJS PBI pada 4 Kota.